

# BAB I

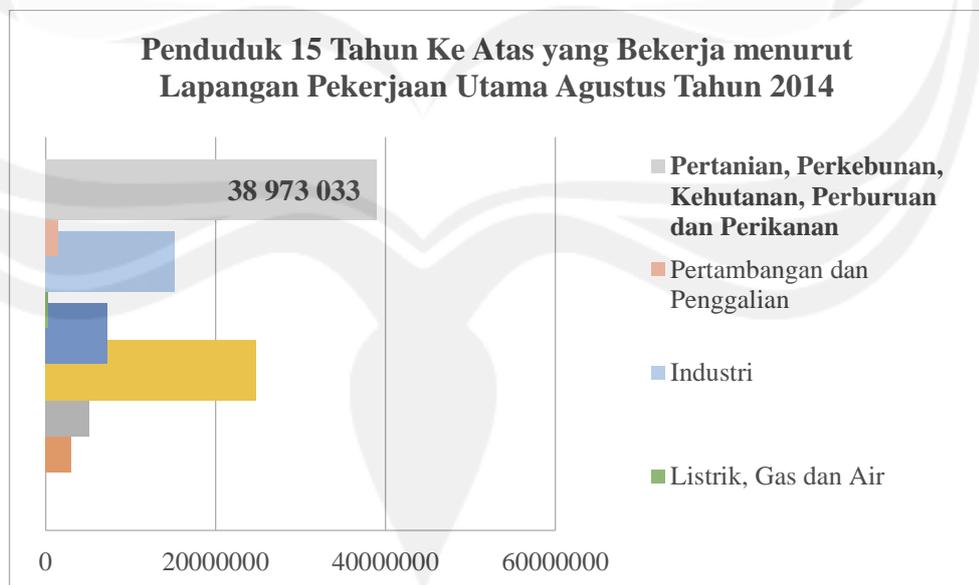
## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia 45% berupa perbukitan dan pegunungan yang dicirikan oleh topo-fisiografi yang sangat beragam, sehingga praktik budidaya pertanian di lahan pegunungan memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian nasional. Selain memberikan manfaat bagi para petani, lahan pegunungan juga berperan penting dalam menjaga fungsi lingkungan daerah aliran sungai (DAS) dan penyangga daerah di bawahnya.

Lahan pegunungan memiliki potensi yang besar sebagai kawasan pertanian produktif. Sejak berabad-abad yang silam, jutaan petani bermukim dan memanfaatkan kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menopang ekonomi keluarga, mereka mengusahakan berbagai macam tanaman, terutama tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman pangan serta ternak dihasilkan di lahan pegunungan.<sup>1</sup>

Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan.

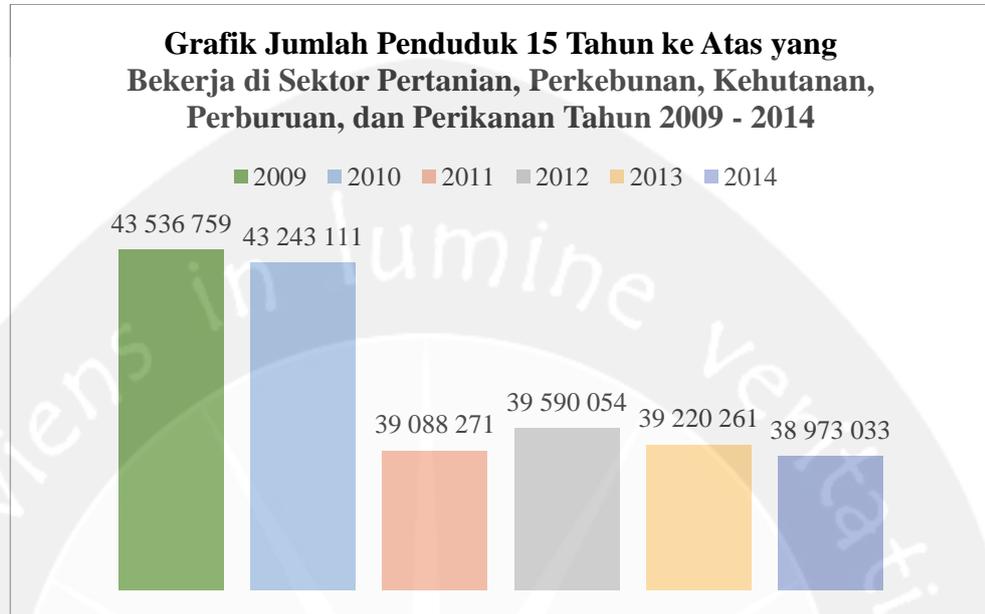


**Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus Tahun 2014**

(Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2014)

<sup>1</sup> Deptan. 2006. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/Permentan/OT/10/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan*. Jakarta : Kementan.

Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan menempati persentase sebesar 34% dari seluruh jumlah pekerja Indonesia di semua sektor.



**Grafik 1. 2 Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2009 - 2014**

(Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2009 - 2014)

Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, setiap tahun ada sebanyak 500 ribu rumah tangga petani beralih profesi ke bidang pekerjaan lain.<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil sensus pertanian 2013 ; penurunan rumah tangga petani dari 31,17 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 26,13 juta rumah tangga pada 2013.<sup>3</sup> Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Kerugian yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi.<sup>2</sup>
- Kurangnya dukungan pemerintah sehingga petani harus berusaha sendiri mulai dari pencarian lahan, pupuk, adanya kemungkinan gagal panen, dan kendala penjualan hasil panen (Witiro, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Muhardi, F. (2015, Maret 12). *Nasional: Umum*. Dipetik September 5, 2015, dari Jumlah Petani Berkurang 500.000 per Tahun: <http://www.antarane.ws.com/berita/484774/jumlah-petani-berkurang-500000-per-tahun>

<sup>3</sup> TEMPO. (2013, September 7). *Home: Bisnis*. Dipetik September 5, 2015, dari Analisis Bisnis: <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/09/07/092511259/bps-jumlah-petani-berkurang>

<sup>4</sup> *Nasional*. (2014, Juli 6). Dipetik September 5, 2015, dari Jumlah Petani di Indonesia Terus Berkurang: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/07/06/288227/jumlah-petani-di-indonesia-terus-berkurang>

- Masalah swasembada pangan : jaringan irigasi, persoalan benih, ketersediaan pupuk, tenaga kerja, dan belum optimalnya peran penyuluhan dalam program-program pertanian (Bapak Momon Resmono, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian).<sup>5</sup>
- Aliran sumberdaya dari wilayah perdesaan ke perkotaan (urbanisasi) akibat ketimpangan pembangunan wilayah. Perdesaan sebagai produsen pertanian mengalami penurunan produktifitas, keuntungan dari usaha tani yang rendah, kurangnya lahan, harga tanah yang tinggi, menjadi halangan generasi muda desa untuk membayangkan masa depan bersama lahan garapan. Generasi muda semakin hilang dan berkurang yang mau bekerja di sektor pertanian. (Nurhady, peneliti di Insist)<sup>6</sup>
- Ketiadaan generasi muda yang mau mengerjakan lahan dan semakin banyaknya orang yang meninggalkan desa, menyebabkan kebutuhan pangan pasti akan disuplai dari luar. Desa yang dulunya eksportir pangan akan berubah menjadi importir. (Nurhady Sirimorok, peneliti dari Innawa, dalam sebuah diskusi di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir Mei 2015 lalu)<sup>6</sup>

Berbagai masalah tersebut perlu ditanggulangi dengan adanya fasilitas edukasi. Fasilitas edukasi berguna sebagai wadah bagi para petani untuk memberikan pengarahan serta penyuluhan dalam program-program pertanian sehingga upaya peningkatan produksi pertanian dapat tercapai. Bagi para generasi muda, adanya fasilitas edukasi diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanian sehingga di masa yang akan datang generasi muda memiliki kesadaran untuk mau menggarap lahan garapan.

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang adalah suatu wilayah yang dikelilingi lima pegunungan (Panca Arga) yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo dan

---

<sup>5</sup> Muhandi, F. (2015, Maret 12). *Nasional: Umum*. Dipetik September 5, 2015, dari Jumlah Petani Berkurang 500.000 per Tahun: <http://www.antarane.ws.com/berita/484774/jumlah-petani-berkurang-500000-per-tahun>

<sup>6</sup> Sumayku, R. (2015, Juni 25). *Beranda: Berita: Lingkungan*. Dipetik September 5, 2015, dari Kurangnya Petani Indonesia Masa Depan: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/kurangnya-petani-indonesia-masa-depan>

Sumbing.<sup>7</sup> Topografi Kabupaten Magelang berupa dataran tinggi, sehingga sektor pertanian dan perkebunan menjadikannya sebagai basis pertumbuhan ekonomi Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2010 – 2030 menyebutkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah kawasan agropolitan. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Magelang telah diprogramkan sejak tahun 2003. Sistem dalam agropolitan meliputi sistem agribisnis, sistem agroindustri, dan sistem agrowisata.

Rustiadi dan Hadi (2007) menyebutkan pada prinsipnya strategi pembangunan agropolitan adalah mendorong kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan melalui pembangunan agropolitan (kota kecil di lingkungan pertanian) atau mikropolitan (kota menengah-kecil) yang diberikan beberapa perlengkapan infrastruktur fasilitas publik perkotaan. Fasilitas publik tersebut antara lain seperti pusat pasar, pusat hiburan (*amenities*), lembaga perbankan dan keuangan, ruang terbuka dan taman. Fasilitas tersebut diperlukan guna mendorong dan mendukung dalam mencapai keberhasilan strategi pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan.

Saat ini, program Kawasan Agropolitan Sumbing terdiri dari tujuh kawasan. Empat kawasan wilayah inti meliputi KTU Kaliangkrik, KT Kajoran, dan KT Windusari. Studi mengenai pelaksanaan sistem agribisnis di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu oleh Rahmawati (2008) menyebutkan bahwa pelaksanaan agropolitan berdampak positif terhadap perekonomian. Sehingga Kebijakan Kawasan Agropolitan Sumbing Magelang layak untuk dilanjutkan. Pembagian wilayah di Kawasan Agropolitan Sumbing tersebut memiliki skala kecamatan, sehingga kurang efektif menyentuh para pelaku sektor pertanian di tingkat desa maupun dusun. Salah satu program untuk menjawabnya adalah *Pengembangan Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik sebagai Subbagian Kawasan Agropolitan Sumbing Magelang, Jawa Tengah (Pengembangan Dusun Butuh)*.

---

<sup>7</sup> Kemendagri. (2011). *Beranda: Profil Daerah: Kabupaten*. Dipetik September 6, 2015, dari Kabupaten Magelang: <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/33/name/jawa-tengah/detail/3308/magelang>

Secara administratif Dusun Butuh terletak di Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik merupakan kawasan perdesaan. Pemetaan oleh Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 terhadap Kecamatan dan Desa Prioritas di Kabupaten Magelang (berdasarkan Data PPLS 2011) menunjukkan bahwa Desa Temanggung termasuk dalam prioritas tingkat 1 dalam pengembangan wilayah. Dusun Butuh masuk ke dalam Wilayah Pengembangan “Bakalsari” (Bandongan-Kaliangkrik-Windusari), dengan fungsi utama Kecamatan Kaliangkrik sebagai pengembangan pertanian, pariwisata dan konservasi alam.

Usaha konservasi alam turut menjadi perhatian para penduduk di Dusun Butuh, yaitu dengan adanya Kelompok GARDA “ATAS AWAN” yang merupakan Gerakan Swadaya Peduli Masyarakat, Hutan dan Gunung. Sekitar tahun ‘84-’88, Dusun Butuh memiliki catatan historis di bidang pertanian dengan adanya swasembada bawang putih. Dusun Butuh memiliki Kelompok Tani “Utama” dan Kelompok Wanita Tani “Utama” yang aktif. Pak Lilik S., selaku Ketua Dusun Butuh mengatakan bahwa Dusun Butuh memiliki potensi pengolahan hasil pertanian dengan alat yang dimiliki oleh kas dusun namun karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pengelolaan terhadap proses pasca panen tersebut masih kurang.

*Pengembangan Dusun Butuh* memfasilitasi tiga konsep agropolitan ; sistem agribisnis, sistem agroindustri, dan sistem agrowisata. Sistem agribisnis yang mewadahi aktivitas proses produksi, pengolahan dan pemasaran. Sistem agroindustri mewadahi aktivitas pengolahan hasil pertanian terutama penanganan pasca panen. Sistem agrowisata mewadahi aktivitas wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai proyek wisata dengan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro.

Balai Pelayanan Dusun Butuh sebagai wadah edukasi bidang lingkungan bagi masyarakat luas dapat menjadi salah satu upaya Pengembangan Dusun Butuh. Balai Pelayanan Dusun Butuh direncanakan dapat mewadahi kegiatan rekreasi seperti mendaki gunung, pengamatan burung, fotografi, dsb. (Chiara &

Callender, 1983, hal. 1265) Kita ketahui saat ini, olahraga mendaki gunung merupakan aktivitas yang diminati oleh kalangan muda. Keberadaan Balai Pelayanan Dusun Butuh - Gunung Sumbing yakni sebagai magnet untuk menarik para pengunjung dari luar daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Dusun Butuh.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tiap tahun menciptakan kesenjangan diantaranya adalah penyediaan prasara dan sarana serta pelayanan umum. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Struktur Ruang Wilayah Provinsi, ibukota Kalingkrik (yang didalamnya mencakup Dusun Butuh), masuk dalam kategori Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.<sup>8</sup> Permukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.<sup>9</sup>

Permukiman mempunyai fungsi strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Maka upaya menempatkan bidang permukiman sebagai salah satu prioritas dan pendekatan desain adalah aspek strategis Pengembangan Dusun Butuh.

Masing-masing kawasan permukiman memiliki persoalan. Kawasan permukiman yang belum dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas keseharian, baik kegiatan ekonomi maupun interaksi antar warga. Kawasan permukiman Desa Butuh merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Kawasan Agropolitan Sumbing dan sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Magelang.

---

<sup>8</sup> UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

<sup>9</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Kondisi saat ini, permasalahan permukiman yang dijumpai adalah pembangunan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Proses mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis persoalan kawasan permukiman dan infrastruktur pendukung kawasan diharapkan dapat merumuskan konsep pengembangan permukiman serta merancang kebutuhan kawasan permukiman agrikultur pada wilayah Dusun Butuh, yaitu berupa *sarana*<sup>10</sup> yang berkonteks/berwawasan kawasan.

## **1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN**

Bagaimana landasan konseptual perancangan Pengembangan Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik sebagai Subbagian Kawasan Agropolitan Sumbing Magelang, Jawa Tengah dengan pendekatan arsitektur kawasan yang dapat mewadahi aktivitas permukiman agrikultur berbasis agropolitan?

## **1.3 TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.3.1 Tujuan**

Tersusunnya konsep perancangan Pengembangan Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik sebagai Subbagian Kawasan Agropolitan Sumbing Magelang, Jawa Tengah yang dapat mewadahi aktivitas permukiman agrikultur berbasis agropolitan.

### **1.3.2 Sasaran**

- a. Tersusunnya konsep pemahaman mengenai pengembangan Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik sebagai Subbagian Kawasan Agropolitan Sumbing Magelang, Jawa Tengah.
- b. Tersusunnya konsep makro dan mikro pengembangan Dusun Butuh sebagai Subbagian Kawasan Agropolitan Sumbing Magelang, Jawa Tengah.
- c. Tersusunnya konsep tata bentuk dan tata ruang arsitektural perancangan mikro pengembangan Dusun Butuh pada kelompok kegiatan jasa penunjang berupa Balai Pelayanan Dusun Butuh yang mampu mewadahi aktivitas

---

<sup>10</sup> *Sarana* adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

permukiman agrikultur berbasis agropolitan berdasarkan pendekatan arsitektur kawasan.

## **1.4 LINGKUP STUDI**

### 1.4.1 Materi Studi

#### 1.4.1.1 Lingkup Substansial

Lingkup materi yang akan diolah adalah jasa penunjang prasarana dan pelayanan umum pengembangan Dusun Butuh berupa Balai Pelayanan Dusun Butuh.

#### 1.4.1.2 Lingkup Spasial

Lingkup *spatial* pada perencanaan dan perancangan pengembangan Dusun Butuh adalah wilayah Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

#### 1.4.1.3 Lingkup Temporal

Rancangan ini diharapkan dapat menjadi penyelesaian bangunan berkonteks kawasan permukiman dalam pengembangan Dusun Butuh dalam kurun waktu 15 tahun mendatang.

### 1.4.2 Pendekatan Studi

Penyelesaian pendekatan studi dilakukan dengan pendekatan arsitektur berwawasan kawasan permukiman sehingga *Balai Pelayanan Dusun Butuh* dapat mewadahi aktivitas dan kebutuhan masyarakat Dusun Butuh dan sekitarnya.

## **1.5 METODE STUDI**

### 1.5.1 Pola Prosedural

#### 1.5.1.1 Metode Pengamatan dan Pengumpulan Data

Dilakukan dengan menggunakan dua metode :

##### A. Data Primer

Diperoleh melalui pengamatan secara langsung sesuai kondisi nyata. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara:

- Data yang bersifat kualitatif meliputi kegiatan observasi langsung pada tapak terpilih. Studi tapak dilakukan untuk

melihat melihat potensi, kecenderungan kondisi lingkungan yang diperkuat dengan pendokumentasian tapak, dan mengambil foto untuk menggambarkan kondisi tapak

- Data bersifat kuantitatif meliputi hasil wawancara dengan perangkat dusun setempat yang menjadi lokasi tapak terpilih untuk mengetahui kondisi demografi dan sosial budaya dusun.

#### B. Data Sekunder

- Data yang bersifat kualitatif berdasarkan buku atau acuan terkait yaitu peraturan pemerintah. Mempelajari sumber-sumber tertulis mengenai Balai Pelayanan sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan warga, pertanian berkelanjutan, dan mempelajari materi yang dapat mengembangkan potensi tapak.
- Data yang bersifat kuantitatif berdasarkan buku atau acuan terkait, yaitu studi antropometri dan standar dimensi ruang yang mewadahi kegiatan Pengembangan Dusun Butuh.

#### 1.5.1.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data berupa analisis programatik.

##### A. Analisis fungsi dan ruang

Meliputi kegiatan yang akan diwadahi pada objek desain bangunan yang berpengaruh terhadap kebutuhan ruang, besaran ruang, jenis ruang, hubungan ruang dan organisasi ruang.

##### B. Analisis tapak

Analisis terhadap faktor-faktor tapak, meliputi aksesibilitas, penghawaan, pencahayaan, zonasi, view, dan orientasi bangunan.

C. Analisis aklimatisasi ruang

Meliputi tanggapan terhadap orientasi penghawaan, pencahayaan sesuai tapak terpilih terkait dengan objek desain bangunan.

D. Analisis struktur dan konstruksi

Meliputi sistem struktur dan konstruksi yang akan digunakan dalam objek desain bangunan.

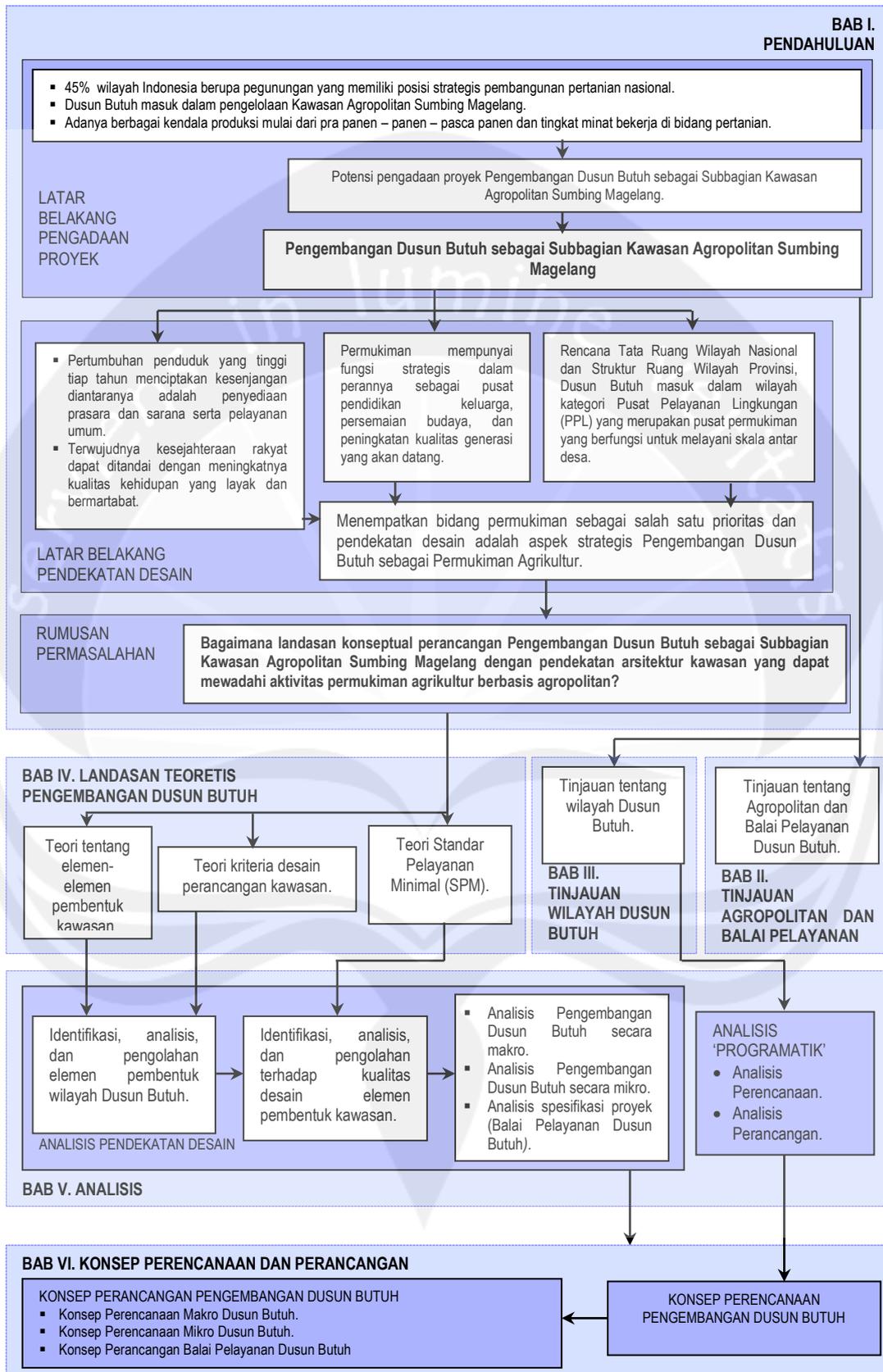
E. Analisis utilitas bangunan

Meliputi sistem drainase dan utilitas bangunan.

1.5.1.3 Metode Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus (kesimpulan deduktif). Kesimpulan digunakan sebagai landasan konseptual perencanaan dan perancangan dengan tujuan untuk menguraikan hasil akhir dalam bentuk gambar perancangan yang menerapkan hasil analisis programatik.

## 1.5.2 Tata Langkah



Sumber : Analisis penulis, 2015

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Gambaran ringkas mengenai isi penelitian dan mempermudah pemahamannya, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang dirinci sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang abstraksi, gambaran umum proyek yang meliputi : latar belakang pengadaan proyek dan pendekatan desain, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode studi atau proses desain, tata langkah dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN AGROPOLITAN DAN BALAI PELAYANAN DUSUN BUTUH**

Berisi tentang proses terbentuknya agropolitan dan penjelasan tentang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), serta Balai Pelayanan Dusun Butuh.

### **BAB III TINJAUAN WILAYAH DUSUN BUTUH**

Berisi tentang tinjauan umum Kabupaten Magelang yang erat kaitannya dengan program kawasan agropolitan. Lebih spesifik kondisi wilayah Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah yang kaitannya dengan perancangan Pengembangan Dusun Butuh.

### **BAB IV LANDASAN TEORETIS PENGEMBANGAN DUSUN BUTUH**

Berisi tinjauan mengenai teori kawasan berupa elemen-elemen pembentuk kawasan, kualitas desain perancangan kawasan, serta Teori Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### **BAB V ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PENGEMBANGAN DUSUN BUTUH**

Berisi analisis perencanaan dan perancangan programatik maupun pendekatan studi yang meliputi : analisis makro dan analisis mikro. Analisis makro mencakup analisis lingkungan yang didalamnya berupa analisis aspek kultural, aspek fiskal, identifikasi elemen pembentuk wilayah Dusun Butuh, dan analisis makro pengembangan Dusun Butuh. Analisis mikro berisi spesifikasi proyek (Balai Pelayanan Dusun Butuh) yang merupakan upaya pengembangan Dusun Butuh. Analisis perencanaan mikro mencakup analisis sasaran pengguna, analisis sistem pengembangan, analisis sistem pelayanan, dan analisis kelembagaan. Analisis

perancangan Balai Pelayanan Dusun Butuh mencakup analisis fungsi, analisis programatik ruang, analisis pendekatan desain, analisis tapak, analisis struktur dan konstruksi, serta analisis utilitas dan kelengkapan bangunan. Analisis digunakan sebagai konsep perencanaan dan perancangan Balai Pelayanan Dusun Butuh.

## BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PENGEMBANGAN DUSUN BUTUH

Berisi keputusan spesifikasi proyek pengembangan Dusun Butuh berupa Balai Pelayanan Dusun Butuh. Konsep perencanaan Balai Pelayanan Dusun Butuh mencakup konsep sasaran pengguna, konsep sistem pengembangan, konsep sistem pelayanan, dan konsep kelembagaan. Konsep perancangan Balai Pelayanan Dusun Butuh mencakup konsep fungsi, konsep programatik ruang, konsep pendekatan desain, konsep tapak, konsep struktur dan konstruksi, serta konsep utilitas dan kelengkapan bangunan secara menyeluruh.